
**PERAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
DALAM MASYARAKAT**

Oleh :
E. Kosasih Danasmita
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Implementasi reformasi pendidikan adalah penetapan UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang implementasinya menyentuh otonomi dibidang pendidikan. Paradigma otonomi bidang pendidikan membawa wacana akan masih adanya kesenjangan antara kurikulum yang diberikan dengan kebutuhan di dalam masyarakat.

Pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup tinggi, *demand* yang rendah akan tenaga kerja yang diakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan serta hilangnya investor asing sebagai penanam modal memberikan dampak yang cukup besar bagi kondisi ketenagakerjaan. Di lain pihak kualitas sumber daya manusia siap pakai Indonesia masih jauh dari kondisi yang menggembirakan. Kualitas sumber daya manusia merupakan harta terpendam yang dimiliki suatu bangsa dan pendidikan merupakan proses sepanjang masa sehingga pemikiran akan sistem pendidikan yang memiliki visi dan misi yang jelas diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Penetapan desentralisasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu kebijakan yang mengakar pada kebutuhan daerah yang dimilikinya. Kebijakan ini membuka peluang daerah untuk menunjukkan keunggulan komparatif daerah dengan segala kendala dan potensi sumber daya yang dimiliki. Di lain pihak tantangan globalisasi yang berimplementasi pada pendidikan tetap menuntut peran pemerintah sebagai arah kebijakan pendidikan secara umum. Pendidikan harus terlembagakan sehingga memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan.

Dalam mengantisipasi globalisasi ketenagakerjaan, sertifikasi ketenagakerjaan *lulusan sekolah kejuruan* harus dapat terakreditasi melalui uji kompetensi. Pendidikan jarak jauh bagi sekolah kejuruan diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. FPTK dapat memberikan pencerahan kepada pengembangan sekolah kejuruan dengan cara turut memberikan pengawasan serta turut aktif mengevaluasi pengembangan yang sedang berjalan agar sesuai dengan yang diharapkan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan. Konsekwensinya, perubahan dan perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan.

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah maupun menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun saat akan datang.

Kondisi di atas merupakan tantangan dunia pendidikan. Cakupan pendidikan hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan secara keseluruhan, karena itu semua bangsa berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna pencapaian tujuan hidup.

Dalam kacamata sosiologi (sosiologi pendidikan), memerankan pendidikan sebagai wahana strategis dalam menghadapi perubahan kehidupan sosial atau dengan kata lain makna pendidikan sebagai agen perubahan telah diterima. Gerakan reformasi pendidikan di negara maju menempatkan

pendidikan sebagai salah satu subsistem kehidupan sosial yang terintegrasi dalam subsistem lainnya, terutama ekonomi, politik, dan budaya. Para pakar pendidikan menyetujui bahwa pendidikan dengan politik dan budaya terkait secara fungsional dalam kehidupan dan menjadi bagian dari pandangan hidup (*education becomes part of the way of life*).

Memperhatikan arah kebijakan politik dalam kaitannya dengan otonomi daerah, arah pendidikanpun berubah. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan keunggulan komparatif daerah, sehingga kebijakan pendidikan di suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya bergantung pada potensi daerah yang dimiliki dan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sinergi kebijakan pendidikan dengan misi maupun visi daerah menjadi hal yang perlu dikembangkan kembali, hal ini terkait pula dengan penyelenggaraan *pendidikan kejuruan* yang diharapkan mampu menyediakan sumber daya manusia *siap pakai*. Dilain pihak otonomi daerah membuka pengakuan kebhinekaan masyarakat dan bangsa sebagai suatu kekuatan dengan memperhatikan arah tantangan internal.

B. Perumusan Masalah

Keterkaitan pendidikan dalam pembangunan dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, politik sangat besar. Pendidikan mengubah masyarakat dalam proses yang terus berkesinambungan. Pendidikan diharapkan mampu memenuhi pasar tenaga kerja daerah dengan tingkat kompetensi yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari daerah lainnya atau dari negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut masalah pokok yang harus dipahami bagaimana menempatkan pendidikan sebagai suatu kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat, dan sejauh mana keberhasilan pendidikan mengantarkan masyarakat menjadi pandangan hidup, menjadi masyarakat yang beradab dan mandiri. Model pendidikan atau pendidikan yang bagaimanakah yang mampu menjadikan peserta didik memenuhi kebutuhannya dan/atau mencapai tujuannya. Dilain pihak bagaimana peran *pendidikan kejuruan* yang sinergis dengan visi dan misi daerah dalam konteks otonomi daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan dari Studi Empiris

Studi Empiris ini bertujuan untuk :

- 1) Menelaah bagaimana arah *pendidikan kejuruan* dalam konteks penyediaan tenaga kerja dengan penelaahan ketenagakerjaan serta transformasi tenaga kerja dalam kaitannya dengan visi dan misi daerah.
- 2) Secara deskriptif seberapa besar *pendidikan kejuruan* mampu menyediakan kebutuhan tenaga kerja siap pakai.
- 3) Faktor-faktor apakah yang menentukan arah *pendidikan kejuruan* di dalam masyarakat, dan potensi pengembangan *pendidikan kejuruan* dalam konteks otonomi daerah.

Kegunaan studi empiris ini adalah (1) Memberikan informasi bagaimana *pendidikan kejuruan* dalam konteks penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan visi dan misi daerah. (2) Memberikan gambaran secara deskriptif bagaimana kondisi tenaga kerja Indonesia dan keterkaitannya dengan potensi daerah dan (3) Memberikan informasi faktor-faktor yang menentukan arah *pendidikan kejuruan* di dalam masyarakat dan potensi pengembangan *pendidikan kejuruan* dalam konteks otonomi daerah. Kegunaan studi empiris ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan, peran akan *pendidikan kejuruan* bagi masyarakat.

D. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian dibatasi pada *pendidikan kejuruan* untuk masyarakat secara umum dengan spesifikasi penyediaan tenaga kerja trampil melalui wacana deskriptif kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja Indonesia dalam konteks pergeseran penawaran tenaga kerja pertanian menjadi tenaga kerja industri, dan sejauh mana keberhasilan *pendidikan kejuruan* dalam konteks pendidikan untuk masyarakat.

PENDIDIKAN KEJURUAN DAN PERANANNYA DALAM MASYARAKAT

A. Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Tatanan kehidupan dunia yang telah berubah membawa arus globalisasi pada setiap sektor kehidupan. Masalah utama yang dihadapi Indonesia sebagai Negara sedang berkembang adalah lemahnya daya saing di bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini disebabkan oleh sistem pengendalian mutu produk dan layanan yang lemah, sistem produksi yang inefesien, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kondisi internal ini berakibat pada investasi luar negeri.

Tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia menduduki peringkat 138 dari 140 negara, berada di atas sedikit Gabon dan Suriname (Sonhadji,2004). Lemahnya daya saing sumber daya manusia diikuti dengan posisi yang rendah dalam bidang pendidikan. Indonesia, di bidang pendidikan (*education*), keuangan domestic (*domestic finance*) dan teknologi informasi (*information technology*), berada dalam peringkat 31 (terendah). Data *Human Development Index* (HDI) Indonesia menduduki peringkat ke 112 dari 175 negara yang dinilai. Kondisi yang menyedihkan karena kita lebih rendah dari negar baru Vietnam.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dalam peringkat kelima dunia kini bukan merupakan sumber daya yang memberikan keuntungan, namun menjadi masalah kependudukan yang serius. Permasalahan penduduk tersebut disebabkan bahwa sumber daya manusia yang kita miliki tidak memiliki keunggulan komparatif. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah, namun daya saing pekerja Indonesia barulah pada tingkat buruh kasar dengan upah minim. Sebagai contoh sebagian besar pekerja Indonesia yang dikirim sebagai pekerja luar, baru pada tingkat pembantu, supir dan kelas pekerja rendah lainnya. Dengan keterbatasan kemampuan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki pekerja Indonesia sering mendapat masalah karena ketidak mampuannya dalam penguasaan bahasa maupun teknologi.

Kondisi pekerja di dalam negeri tidak lebih baik dari pekerja yang dikirim ke luar negeri. Tingkat pengangguran nyata dan terselubung Indonesia masih sangat tinggi dan belum mampu dituntaskan oleh pemerintah. Tingkat pengangguran ini menjadi beban Negara dan dapat menyebar menjadi permasalahan sosial, keamanan, politik serta ekonomi.

A.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Penduduk sebagai komponen suatu bangsa dibagi dua yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk usia yang bekerja atau mencari kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang khusus melakukan kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya dan sama sekali tidak bekerja, atau mencari pekerjaan (BPS,2000). Populasi penduduk Indonesia dan aktivitasnya ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan Jenis Aktivitas Penduduk Indonesia

Jenis	1996	1997	1998	1999	
Penduduk di atas 15 tahun	131.878.957	135.070.932	138.556.198	141.096.417	141.312.722
Angkatan Kerja	88.186.772	89.602.835	92.734.932	94.847.178	95.695.979
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	66.87%	66.34%	66.63%	67.22%	67.72%
Bekerja	4.471.020	4.197.306	5.062.483	6.030.319	5.871.956
Mencari Pekerjaan	43.692.185	45.467.515	45.821.266	46.249.239	45.614.743
Bukan Angkatan Kerja	10.794.865	10.814.356	11.273.682	10.934.731	10.811.539
	23.987.821	25.896.013	25.266.906	25.857.621	25.333.554

Pembaruan definisi angkatan kerja terjadi pada tahun 1995 (Chotibi,2000). Pada tahun 1995 ILO (*International Labor Organization*) menyebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk

yang berusia sama atau lebih dari 15 sampai 60 tahun. BPS mengadakan pembaruan mengacu pada ILO, bukan usia 10 tahun ke atas seperti yang digunakan tahun-tahun sebelumnya.

Konsep pengangguran penuh atau pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan pengangguran terselubung atau setengah pengangguran (*under unemployment*) memiliki definisi yang berbeda. BPS dalam buku pengembangan *Metoda Perhitungan Pengangguran* mendefinisikan pengangguran penuh sebagai proporsi keadaan usia kerja (15-65 tahun) yang menghadapi ketiadaan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Setengah pengangguran menunjuk pada situasi pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan pengalaman bekerja orang yang bersangkutan tidak memenuhi aturan atau norma-norma pekerjaan yang ditetapkan.

Kedua konsep tersebut mengungkapkan bahwa pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan dalam usahanya memperoleh pekerjaan, sedangkan setengah pengangguran merujuk pada ketidakpuasan seseorang atas pekerjaan yang dilakukan.

Kondisi setengah pengangguran terbagi dalam dua keadaan yaitu setengah pengangguran kentara (*visible unemployment*) dan setengah pengangguran tidak kentara (*invisible unemployment*). Bagian pertama mencerminkan ketidak cukupan dalam volume pekerjaan dan yang kedua mencerminkan ketidaktepatan sumber daya manusia atau adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan faktor produksi.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan setengah penganggur kentara terbagi dalam tiga kriteria yaitu bekerja kurang dari jam normal, melakukan pekerjaan dengan terpaksa masih mencari kerja dan bersedia menerima pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan. Kriteria ini berarti bahwa termasuk kedalamnya orang yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan pekerja mandiri atau berusaha sendiri dalam periode tertentu masih bersedia menerima pekerjaan lain atau tambahan. BPS tidak mengacu kepada konsep setengah penganggur ini. Setengah penganggur di Indonesia didefinisikan sebagai angkatan kerja yang selama periode tertentu bekerja kurang dari 35 jam perminggu.

BPS pada tahun 1999 kemudian menyempurnakan definisi setengah penganggur menjadi orang yang bekerja di bawah 35 jam perminggu, tetapi tak mencari pekerjaan dan tak bersedia menerima pekerjaan lain disebut setengah pengangguran sukarela. Sehingga ukuran pengangguran di Indonesia merupakan penjumlahan banyaknya orang yang terbuka dan setengah penganggur terpaksa.

A.2. Dinamika Kesempatan Kerja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja terkait dengan kehidupan ekonomi yang selalu dinamis, dimana ada kegiatan-kegiatan yang baru timbul, ada yang maju, berkembang, meningkat, berpindah, dan ada yang mundur dan hilang. Perubahan tersebut merupakan proses yang simultan sehingga disebut dinamika. Suroto (1992) mengatakan bahwa dinamika pasar kerja adalah bagaimana penawaran atau persediaan tenaga kerja dan permintaan atau kebutuhan tenaga kerja dalam pasar mengembang menyusut. Sehingga dinamika kesempatan kerja diartikan sebagai pola-pola perubahan penyerapan tenaga kerja.

Penciptaan kesempatan kerja dipengaruhi dua faktor pokok yaitu proses produksi dan pasar. Dalam proses produksi diperlukan adanya investasi, faktor input berupa bahan, energi alam dan energi manusia dengan menggunakan teknologi dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pasar diperlukan untuk mendistribusikan hasil produksi dan meningkatkan nilai guna hasil produksi (Suroto,1992). Misal,besarnya kesempatan kerja sektor pertanian dipengaruhi oleh luas tanah pertanian, produktivitas tanah, intensitas tanam dan teknologi yang diterapkan. Di luar sektor pertanian kesempatan kerja dipengaruhi oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi.

Menurut proyeksi Bappenas, jumlah pengangguran terbuka akan terus meningkat, kondisi tersebut dilihat dari jumlah penganggur pada tahun 2005 mencapai jumlah 11,20 juta. Hal yang menyedihkan juga terus menimpa Indonesia dengan hilangnya investor asing yang menanamkan modalnya, sehingga tenaga kerja formal di perkotaan hilang hingga satu juta (Aljufri,2005).

Bagaimana posisi *pendidikan kejuruan* dengan kondisi ketenagakerjaan yang penuh tantangan tersebut dan bagaimana perannya dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif secara umum, akan dikaji dalam peran sekolah kejuruan dalam transformasi tenaga kerja.

B. Peran Sekolah Menengah Kejuruan dalam transformasi Struktur Tenaga Kerja

Salah satu tujuan keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah mempersiapkan lulusan guna memasuki lapangan kerja. Oleh sebab itu, bentuk hubungan yang terjadi antara *pendidikan kejuruan* dengan ketersediaan kesempatan kerja haruslah relevan. Hal inilah yang sering

menjadi polemik dan munculnya gap keseimbangan dunia kerja dan spesifikasi jenis permintaan tenaga kerja. Sekolah kejuruan sebagai penghasil tenaga kerja siap pakai mendapat tantangan berkaitan dengan konteks otonomi daerah. Dalam konteks ini sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu mengembangkan visi dan misi sesuai dengan keunggulan komparatif daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Implementasi dari sekolah menengah kejuruan berorientasi pada dunia kerja, didasarkan pada kebijakan *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan). Departemen Pendidikan merumuskan bahwa secara filosofis *link and match* merupakan cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan dalam kaitan yang harmonis dan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam pembangunan sangatlah luas, bersifat multidimensional dan multisektoral mulai dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk pembinaan warga Negara yang baik, kebutuhan dunia kerja.

Tujuan penerapan *link and match* dalam *pendidikan kejuruan* adalah untuk mendekatkan antara *supply* dan *demand* mutu SDM, terutama yang berhubungan dengan kualitas ketenagakerjaan. Di mana dunia pendidikan sebagai penyedia SDM dan dunia kerja serta masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan. *Link and match* dalam sekolah kejuruan pada dasarnya menyangkut upaya peningkatan sistem pendidikan agar benar-benar berfungsi sebagai wahana atau instrumen bagi pembangunan dan perubahan sosial, sekaligus bermanfaat bagi investasi masa depan.

Dalam realisasi program *link and match* maka dilakukan program pendidikan system ganda (PSG). Penerapan PSG merupakan pengembangan dari magang yaitu belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar langsung dari sumber belajar dengan aspek meniru sebagai unsur utamanya (Hasbulah,2006).

Tujuan dasar penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah jenjang pendidikan menengah yang memiliki misi khusus. Sekolah menengah kejuruan bertujuan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan sikap professional (Peraturan Pemerintah N0.29/1990) sebagai tenaga kerja tingkat menengah pada DUDI.

Dalam UUSPN tahun 2003 dikatakan bahwa tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), adalah:

1. Tujuan Umum

- a) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik.
- b) Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalankan kehidupan secara layak.
- c) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab.
- d) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga yang memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.
- e) Menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni.

2. Tujuan Khusus

- a) Menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati.
- b) Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, dan mampu mengembangkan sikap professional dalam bidang yang diminatinya.
- c) Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan teknologi agar mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

C. Model Penyelenggaraan Pendidikan di SMK

Greinet (1994) yang dikutip oleh Hasbulah(2006), seorang pakar *pendidikan kejuruan* dari Jerman menyebutkan bahwa terdapat tiga model dalam *pendidikan kejuruan* : model pasar (*the market model*), model sekolah (*the school model*), dan model sistem ganda (*the dual system model*). Pada model pasar pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini sering juga disebut model liberal dan langsung diarahkan pada produksi dan pasaran kerja. Dalam model pendidikan sekolah, pemerintah berperan merencanakan, mengorganisasikan, memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model pendidikan seperti ini disebut pula model birokratik. Sedangkan model sistem ganda pada dasarnya merupakan perpaduan dari model pasar dan model sekolah. Peran pemerintah dalam *dual system* atau system ganda adalah sebagai pengawas model pasar. Disebut *dual system* karena pelaksanaan pendidikan ada di dua tempat yaitu sekolah dan dunia usaha.

Selain tiga model yang disebutkan di atas, terdapat model kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri yang dikembangkan di Amerika Serikat, disebut model pendidikan kooperatif (*cooperative education*). Pendidikan kooperatif tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) dilindungi oleh undang-undang yang kuat, sehingga baik sekolah maupun industri mempunyai ikatan legal yang harus dipatuhi; (2) memadukan pengajaran yang berorientasi pada lapangan kerja (*occupationally oriented instruction*) di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan pekerjaan (*work related learning experience*) di industri; (3) kegiatan ini direncanakan dan disupervisi secara baik; (4) adanya pengaturan waktu antara kegiatan secara berlapis-berulang, yang memungkinkan siswa dapat belajar di sekolah sambil bekerja di industri; (5) pengalaman belajar bekerja harus sesuai dengan program studi atau tujuan karir subjek didik; (6) adanya perjanjian pelatihan siswa (*student training agreement*) yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, koordinator/sekolah dan supervisor/perusahaan; (7) diberikannya upah kepada siswa yang sedang bekerja oleh perusahaan yang bersangkutan (Humbert & Woloszyk, 1993). Pendidikan kooperatif merupakan sistem pelatihan di industri, sedangkan basis pendidikannya tetap di sekolah. Perbedaan pendidikan sistem kooperatif dengan model pendidikan tradisional (*the school model*), terletak pada penyelenggaraan praktek industri yang lebih terencana, bersistem, dan diperkuat oleh undang-undang berbasis sekolah dan PSG.

Model pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan yang digunakan di Indonesia adalah model pendidikan sistem ganda (PSG) dengan berbagai kondisi dan kendala. Kendala pelaksanaan pendidikan sistem ganda tersebut berkaitan dengan keragaman geografis, keragaman kesiapan dan potensi Sekolah Menengah Kejuruan, keragaman program SMK yang kurang didukung oleh keberadaan industri daerah, sulitnya menjalin kerjasama dengan perusahaan dan industri, kurang efektifnya pembimbing dan instruktur di sekolah, serta lemahnya manajemen pelatihan di industri.

D. Paradigma Otonomi Pendidikan Konsep dan Praktikny.

Otonomi pendidikan membawa paradigma pendidikan yang baru; visi baru tentang realitas pendidikan, perubahan yang mendasar pada pemikiran persepsi dan nilai-nilai yang akan dimiliki berkaitan dengan pendidikan. Menurut berbagai konsep pemikiran yang ada, maka paradigma baru pendidikan hendaknya memperhatikan persepsi yang ada dari paradigma mekanik ke paradigma organik yaitu paradigma yang memandang sekolah sebagai bagian dari pendidikan dimana dalam kehidupan, sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya.

Selanjutnya paradigma otonomi pendidikan tersebut harus menunjukkan ciri-ciri demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah yang lebih akuntabel serta pendidikan yang berbasis masyarakat. Pendidikan sebagai wahana peningkatan nilai tambah dan kualitas sumber daya manusia memiliki berbagai fungsi yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D.1. Demokratisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu yaitu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama. Dengan demikian segala jenis homogenisasi masyarakat yaitu menyamaratakan anggota masyarakat menuju uniformitas adalah bertentangan dengan ciri-ciri hidup berdemokrasi. Termasuk didalamnya pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan inti dari kehidupan berdemokrasi di dalam segala aspek kehidupan. Di dalam bidang pendidikan, semua warga Negara memiliki hak yang sama dalam pendidikan yang baik, juga memiliki kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan yang berkualitas.

Demokrasi adalah kehidupan yang menekankan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut tidak lain ialah nilai-nilai yang mengakui kehormatan dan martabat manusia (*human dignity*). Oleh sebab itu, proses pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai proses harmonisasi dan proses humanisasi. Pendidikan bukan hanya sekedar menghidupi peserta didik tetapi juga mengembangkan sebagai manusia (*human being*). Pendidikan nasional bertujuan untuk melahirkan dan mengembangkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, dan produktif.

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah akan memberikan implikasi langsung didalam penyusunan dan penentuan kurikulum yang dewasa ini sangat sentralistik dan sangat memberatkan peserta didik. Desentralistik pendidikan dan kebudayaan menuntut adanya artikulasi dalam semua tingkat dan jenis penyelenggaraan pendidikan. Kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan pengembangan daerah dapat dieliminir, sehingga pengembangan sumber daya yang dimiliki daerah dapat optimal dan akuntabel. Keluhan bahwa pendidikan selama ini telah mengasingkan dengan kehidupan masyarakat dapat diatasi. *Community Based Education* serta

school Based Education management merupakan perwujudan nyata dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Dalam kaitan ini pendidikan yang diinginkan ialah pendidikan pemberdayaan yaitu yang bertujuan memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri.

Dapat disimpulkan pelaksanaan desentralisasi tidak dapat berjalan tanpa partisipasi penuh anggota masyarakat dari bawah (*grass root*). Kurikulum nasional bersifat tidak mengikat otonomi pendidikan di daerah otonom. Kurikulum nasional tetap diperlukan sebagai arah pendidikan yang diharapkan. Pelaksanaan otonomi pendidikan diharapkan dapat membentuk masyarakat mandiri dengan inovasi kekhasan daerah yang dimiliki akan terbentuk yang pada akhirnya didapat keunggulan komparatif daerah.

Program pendidikan sekolah kejuruan yang hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja untuk bekerja di industri seperti yang terjadi pada saat ini memiliki konsekuensi berkaitan ketergantungan akan keberadaan industri. Konteks ini membawa indikasi bahwa keberadaan sekolah menengah kejuruan sangat bergantung sepenuhnya pada perkembangan industri dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Independensi lulusan sekolah kejuruan untuk dapat mandiri dipertanyakan, oleh karena itu pembentukan kurikulum yang khas sesuai potensi dan keunggulan daerahnya kini perlu dikaji ulang.

D.2. Penetapan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*)

Manajemen berbasis sekolah adalah konsep yang mengandalkan pemberian otonomi yang luas kepada kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah diharapkan wajib melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, dengan tetap mengacu pada kerangka kebijakan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilaksanakan dengan tujuan sekolah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prioritas kebutuhan dan tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Hasil analisis berdasarkan hasil survey yang dilaporkan oleh Bank Dunia (2005) menemukan bahwa (1) kepala sekolah tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam mengelola keuangan sekolah yang dipimpinnya, (2) kemampuan manajemen kepala sekolah pada umumnya rendah terutama pada sekolah-sekolah negeri, (3) pola anggaran tidak memungkinkan bagi guru yang berprestasi baik mendapatkan insentif lebih dan (4) peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat kecil dalam pengelolaan sekolah. Indikasi hasil penemuan ini menunjukkan bahwa kemandirian sekolah dalam pelaksanaan peningkatan sekolah sangat kecil.

Konsep Manajemen Sekolah diharapkan dapat mengatasi kendala pengelolaan sekolah, di mana sekolah dapat lebih leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta makin bersemangat dalam membuat langkah-langkah inovasi baik dalam proses pembelajaran maupun evaluasi kinerja pendidikan.

Kaidah efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pegangan penting dalam penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Sejalan dengan pelaksanaan kaidah tersebut, pelaksanaan MBS menuntut pembentukan komite di dalam tingkat sekolah, yang disebut Komite Sekolah atau Dewan Sekolah yang terdiri dari para tokoh masyarakat atau wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSK) yang berminat dalam peningkatan bidang pendidikan.

D.3. Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*).

Konsep pemberdayaan pendidikan ini memperhatikan kebutuhan setempat dengan mengandalkan kekuatan dan sumber daya yang digali dan dikembangkan dari potensi lokal dengan melibatkan peran serta masyarakat secara lebih nyata dan akurat. Aktivitas pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat akan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam masyarakat, sehingga proses yang berlangsung di sekolah tidak hanya kegiatan pendidikan, tetapi juga kegiatan ekonomi produktif. Dari kegiatan ekonomi produktif inilah sekolah dapat membiayai pelaksanaan pendidikan. Proses pembelajaran dalam komunitas kerja membawa suasana bagaimana siswa mengantisipasi kegiatan dalam masyarakat. Keterampilan ini digunakan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan setelah tamat dari pendidikan nanti. Pendidikan kewirausahaan diberikan pula agar siswa mampu hidup mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan gagasan *life skill*.

Penerapan pendidikan berbasis masyarakat dalam *sekolah kejuruan* merupakan sebuah wacana yang harus dikedepankan sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan secara umum yang harus *link and match* dengan kebutuhan masyarakat. Wacana yang harus dikedepankan dalam

pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat adalah visi dan misi sekolah kejuruan yang harus jelas. Pendidikan yang dilaksanakan memberikan informasi dan tujuan pendidikan yang ditempuh. Visi dan misi yang jelas dalam sekolah diwujudkan dalam keseluruhan program sekolah yang sinergis. Sinergitas visi dan misi tersebut membutuhkan inovasi yang terus menerus dari seluruh komponen sekolah.

Inovasi pendidikan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang diharapkan sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Konteks inovasi dalam konteks otonomi pendidikan adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki, baik dalam tenaga, uang, sarana dan prasarana termasuk struktur dan prosedur organisasi pendidikan. Pembentukan organisasi sekolah diharapkan fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta visi dan misi sekolah kejuruan.

Pemetaan peran sekolah kejuruan dengan menerapkan inovasi pendidikan diharapkan mampu menopang ketinggalan Indonesia dalam persaingan global. Kedudukan Indonesia dalam pendidikan sebagai peringkat 60 dari 72 negara yang ada diharapkan akan berubah. Tantangan yang dihadapi sekolah kejuruan dan dunia pendidikan Indonesia secara umum memang tidak menggembirakan, sehingga inovasi yang produktif, peka terhadap perkembangan IPTEK, dan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran merupakan tuntutan bagi sekolah kejuruan dan sekolah umum lainnya.

KESIMPULAN

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Implementasi reformasi pendidikan adalah penetapan UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang implementasinya menyentuh otonomi dibidang pendidikan. Paradigma otonomi bidang pendidikan membawa wacana akan masih adanya kesenjangan antara kurikulum yang diberikan dengan kebutuhan didalam masyarakat.

Pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup tinggi, *demand* yang rendah akan tenaga kerja yang diakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan serta hilangnya investor asing sebagai penanam modal memberikan dampak yang cukup besar bagi kondisi ketenagakerjaan. Di lain pihak kualitas sumber daya manusia siap pakai Indonesia masih jauh dari kondisi yang menggembirakan. Kualitas sumber daya manusia merupakan harta terpendam yang dimiliki suatu bangsa dan pendidikan merupakan proses sepanjang masa sehingga pemikiran akan sistem pendidikan yang memiliki visi dan misi yang jelas diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Penetapan desentralisasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu kebijakan yang mengakar pada kebutuhan daerah yang dimilikinya. Kebijakan ini membuka peluang daerah untuk menunjukkan keunggulan komparatif daerah dengan segala kendala dan potensi sumber daya yang dimiliki. Di lain pihak tantangan globalisasi yang berimplementasi pada pendidikan tetap menuntut peran pemerintah sebagai arah kebijakan pendidikan secara umum. Pendidikan harus terlembagakan sehingga memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan.

Dalam mengantisipasi globalisasi ketenagakerjaan, sertifikasi ketenagakerjaan **lulusan sekolah kejuruan** harus dapat terakreditasi melalui uji kompetensi. Pendidikan jarak jauh bagi sekolah kejuruan diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. FPTK dapat memberikan pencerahan kepada pengembangan sekolah kejuruan dengan cara turut memberikan pengawasan serta turut aktif mengevaluasi pengembangan yang sedang berjalan agar sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aljufri, B, (2006), *Standarisasi Kualitas Pendidikan Teknologi Kejuruan*, Makalah dalam Prosiding Konvensi Nasional APTEKINDO III dan Temu Karya XIV FT/FPTK/JPTK Universitas se-Indonesia, Gorontalo.

Anderson, dkk (2001) *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing.*, Addison Wasley Longman Inc. : New York.

Depdiknas., 2002., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta : Depdiknas.

-
- Dewa Komang Tantra, 2003. *Assesmen Berbasis Kompetensi dalam Pembelajaran*. Makalah penataran tentang Wawasan Konseptual Pendidikan Berbasis Kompetensi (CBTE). Jakarta : Dirjen Dikti
- Ditp2tkkpt (2005). *Standar kompetensi guru pemula sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Ditp2tkkpt
- Sekretariat Negara RI (2005). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Sekretariat Negara RI (2003). *Undang-undang republik indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Suyitno,(2004), *Isu Strategik Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Makalah dalam Proceedings Konvensi Nasional Aptekindo II dan temu karya XIII FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP se-Indonesia. Jakarta.
- Tuloli, Yusuf, (2006), *Peran Dunia Kerja dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan*, Makalah dalam Prosiding Konvensi Nasional APTEKINDO III dan temu Karya XIV FT/FPTK/JPTK Universitas se-Indonesia Gorontalo.
- Wibowo, Basuki, (2004), *Pembiayaan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Makalah dalam Proceedings Konvensi nasional APTEKINDO II dan Temu Karya XIII FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP se-Indonesia. Jakarta.
- Harris., R., dkk. (1995) *Competency-based education and training : between a rock and whilpool*, South Melboure : MacMillan Education Australia.

